

AKUNTABILITAS PUBLIK DARI ASPEK PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN ASET TETAP

Sukmini Hartati¹, Choiruddin², Hadi Winarko³, Rita Martini⁴

¹²³⁴ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang, 30139
sukmini_hartati@yahoo.co.id, choirudd1n@gmail.com, ritamartini@polsri.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap akuntabilitas publik. Sampel yang digunakan sebanyak 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis regresi berganda. Kebaharuan penelitian ini menganalisis penatausahaan aset tetap mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, meliputi dimensi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Akuntabilitas publik di pemerintah kota Palembang, ditinjau dari akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial inventarisasi dan pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan pembukuan tidak mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kota Palembang, dan secara simultan berpengaruh signifikan.

Kata kunci: akuntabilitas publik

Abstract

This study aims to analyze the effect of the administration of fixed assets on public accountability. The sample used was 30 OPD in Palembang. The analytical technic used is multiple regression analysis. The novelty of this research, the administration of fixed assets analyzed refers to Permendagri Number 19 of 2016, covering the dimensions of bookkeeping, inventory and reporting. Public accountability is seen from the accountability of policies, programs, processes, as well as honesty and law. The results showed partially that the inventory and reporting variables had a positive and significant influence while bookkeeping did not have a positive and significant influence on the public accountability, and simultaneously had significant effect.

Keywords: public accountability

1. Pendahuluan

Salah satu lingkup pengelolaan aset tetap yaitu penatausahaan aset tetap, dimana rangkaian kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya yaitu penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap BMD.

Penatausahaan aset tetap yang baik akan diperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat mengenai aset, maka memudahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut.

Keberagaman data pencatatan aset memunculkan masalah dalam penatausahaan, oleh karenanya proses penatausahaan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah mengingat golongan aset yang dipersyaratkan harus

sesuai standar akuntansi pemerintahan sebab tidak semua data telah lengkap atau dimiliki dengan benar dan pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak adanya data yang terintegrasi, maka akan sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat status neraca yang dapat meyakinkan *stakeholder*. Kepercayaan tersebut meliputi kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset dan nilai aset (Yusuf, 2010) dalam (Bokingo, 2017). Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis besar dan secara fisik terdiri dari berbagai jenis dan tersebar lokasinya menimbulkan kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya disebabkan lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah (Mahmudi, 2010) dalam (Bokingo, 2017).

Penatausahaan aset tetap meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar BMD oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk

digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap BMD dan manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Kebaharuan penelitian ini menganalisis penatausahaan aset tetap mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, meliputi dimensi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Akuntabilitas publik di pemerintah kota Palembang, ditinjau dari akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum (Mardiasmo, 2018).

2. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal asosiatif. Peneliti menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan akuntabilitas publik, dimana pembukuan, inventarisasi dan pelaporan merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan akuntabilitas publik merupakan variabel yang dipengaruhi.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas publik. Sedangkan variabel independen yaitu pembukuan (X_1), inventarisasi (X_2) dan pelaporan (X_3).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 30 OPD kota Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Masa kerja responden di jenjang

pimpinan/manajer minimal 3 tahun 2) Responden merupakan Kepala OPD, Sekretaris dan 2 staf bagian aset didapatkan dari jumlah responden yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel yang diharapkan dapat mewakili masing-masing OPD. Dengan demikian total sampel adalah 120 orang/respnden.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan cara survei melalui penyebaran kuesioner.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk melakukan analisis regresi sederhana. Pengujian tersebut dilakukan untuk menghindari atau mengurangi bias atas hasil penelitian yang diperoleh. Pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Model Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model analisis linear berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang merujuk pada (Priyatno, 2018, p. 107), yaitu:

$$AP = a + b_1Pb + b_2Inv + b_3Plp + e$$

Keterangan:

AP	= Akuntabilitas Publik
a	= Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefisien Regresi
Pb	= Pembukuan
Inv	= Inventarisasi
Plp	= Pelaporan
e	= Faktor lain

Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependent (Priyatno, 2018).

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Priyatno, 2018).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai R² ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal (Priyatno, 2018, p. 73). Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan analisis statistik. Titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Model regresi layak dipakai untuk memprediksikan keberhasilan akuntabilitas publik berdasarkan masukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai probabilitas (p value) atau nilai *asympt.sig.* (2-tailed) residual memiliki nilai 0,336. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,336 > 0,05), maka nilai residual tersebut telah normal. Hasil uji multikolinieritas menghasilkan nilai *tolerance* ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas

menggunakan uji *Glejser*. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat diketahui nilai signifikansi (*Sig.*) ketiga variabel independen lebih dari 0,05, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar),

mengindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	17,115	5,506	3,109	0,002
Pembukuan	-0,410	0,263	-1,556	0,123
Inventarisasi	0,702	0,278	2,526	0,013
Pelaporan	0,635	0,248	2,562	0,012

Sumber: *Output* SPSS versi 22 (2019)

Diperoleh model persamaan regresi linear berganda:

$$AP = 17,115 - 0,410 Pb + 0,702 Inv + 0,635 Plp + e$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 17,115 menunjukkan apabila variabel independen yaitu pembukuan, nventarisasi dan pelaporan nilainya 0 maka akuntabilitas publik sebesar 17,115 atau 17,115 %.
2. Koefisien regresi pembukuan sebesar -0,410 nilai yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara pembukuan dengan akuntabilitas publik yang artinya jika nilai pembukuan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan turun sebesar 0,410%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

3. Koefisien regresi inventarisasi sebesar 0,702 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara inventarisasi dengan akuntabilitas publik yang artinya jika nilai variabel inventarisasi naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan naik sebesar 0,702%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Koefisien regresi pelaporan sebesar 0,635 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pelaporan dengan akuntabilitas Publik yang artinya jika nilai pelaporan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan naik sebesar 0,635%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Uji Parsial t

Hasil uji statistik t disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	thitung	Ttabel	Sig.	Keterangan
Pembukuan	-1,556	1,982	0,123	Tidak Signifikan
Inventarisasi	2,526	1,982	0,013	Signifikan
Pelaporan	2,562	1,982	0,012	Signifikan

Sumber: *Output* SPSS versi 22 (2019)

1. Pembukuan (X1)

Variabel pembukuan dari *output* SPSS didapat t hitung sebesar -1,556. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $112-3-1 = 108$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai $-t$ tabel $< t$ hitung ($-1,982 < -1,556$) maka H_1 ditolak. Jika signifikansi < 0.05 maka H_2 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H_1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,123 > 0,05$) maka H_1 ditolak. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar -1,556 dengan nilai signifikansi 0,123, maka dapat disimpulkan pembukuan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik.

2. Inventarisasi (X2)

Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai t hitung $> t$ tabel ($2,526 > 1,982$) maka H_2 diterima. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_2 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_2 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,013 <$

0,05) maka H_2 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,526 dengan nilai signifikansi 0,013, maka dapat disimpulkan inventarisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

3. Pelaporan (X3)

Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai t hitung $> t$ tabel ($2,562 > 1,982$) maka H_3 diterima. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_3 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_3 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) maka H_3 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,562 dengan nilai signifikansi 0,012, maka dapat disimpulkan pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Uji Simultan (F Test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap akuntabilitas publik. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Sig.	Keterangan
17,398	2,689	0,000	Signifikan

Sumber: *Output* SPSS versi 22 (2019)

Nilai F -hitung adalah sebesar 17,398 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan F -hitung sebesar 17,398 lebih besar dari F -tabel 2,689, sehingga dapat dinyatakan secara simultan variabel independen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada *output Model Summary* dari hasil analisis regresi berganda. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate
0,571	0,326	0,307	3,340

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

Nilai adjusted R square sebesar 0,307, menunjukkan sumbangan pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan adalah 30,70% artinya memiliki hubungan relatif rendah. Sisanya 69,30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Pengaruh Pembukuan terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan pembukuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pembukuan (Republik Indonesia, 2016) adalah proses pencatatan BMD ke dalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar BMD. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Dalam praktiknya, Pemkot Palembang sudah melaksanakan pembukuan BMD yang merupakan proses pencatatan BMD ke dalam daftar barang pengguna yang dimuat dalam kartu inventarisasi barang dan kartu inventarisasi ruang, selanjutnya dicatat dalam daftar BMD. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodifikasi barang milik

daerah. Akan tetapi peraturan daerah yang tersedia saat ini tidak mengatur mengenai pencatatan secara spesifik, sehingga membuat pencatatan menjadi kurang terstruktur, akibatnya aset tetap dicatat secara gabungan. Semua aset yang berasal dari sumber yang berbeda-beda pencatatannya dijadikan satu dan tidak dibedakan sehingga menyebabkan kerancuan dalam perlakuan terhadap aset itu sendiri dan sebagian besar pegawai subbidang aset tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari jawaban responden dalam pengisian kuesioner.

Hasil penelitian ini konsisten dengan (Imbiri, 2018), pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Pembukuan (Simamora, 2011) tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah, karena pengguna barang dan pengurus barang di OPD tidak melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMD, Laporan BMD dan Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.

Pengaruh Inventarisasi terhadap Akuntabilitas Publik

Inventarisasi (Republik Indonesia, 2016) merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan BMD dalam unit pemakaian. Pengguna barang melakukan

inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan inventarisasi sudah dilaksanakan oleh kota Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dari adanya pelaksanaan inventarisasi, seperti dokumen pencatatan yang berbentuk Buku Induk Inventarisasi, Buku Inventarisasi, KIB dan KIR. Walaupun dalam praktiknya masih kurang baik karena masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya dampaknya banyak aset yang tidak digunakan dan dikelola dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Abas, 2013) dan (Hartati, dkk., 2019) inventarisasi mempengaruhi pengamanan barang milik daerah dan inventarisasi (Imbiri, 2018) mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance*, baik pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa BMN BMD.

Pengaruh Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik

Pelaporan (Republik Indonesia, 2016) adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Kuasa pengguna anggaran harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan, laporan yang dimaksud digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pelaporan yang dilakukan setiap OPD sudah baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun masih belum tepat waktu dikarenakan adanya kendala dalam proses sebelumnya yaitu pembukuan dan inventarisasi. Pemerintah Kota Palembang telah mencoba memaksimalkan kinerjanya dalam upaya pelaksanaan pengelolaan barang, hal ini dilihat dari hasil pelaporan yang telah memuat seluruh dokumen wajib seperti buku inventarisasi, rekap buku inventarisasi, daftar mutasi barang dan sebagainya yang menjadi dasar dalam penyusunan neraca pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung (Simamora, 2011), dan (Martini, dkk., 2019) pelaporan BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan BMD. Namun, tidak sejalan dengan (Imbiri, 2018), pelaporan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Penatausahaan (Republik Indonesia, 2016) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam sistem tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, serta pemeliharaan terhadap aset tetap/BMD yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus dan dari beberapa siklus tersebut, penatausahaan merupakan hal yang tidak dapat diremehkan, sebab penatausahaan sangat bermanfaat bagi siklus lainnya. Apabila penatausahaan aset tetap dilaksanakan dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait masing-masing siklus pengelolaan aset tetap yang lain akan tercipta secara optimal. Oleh karena itu, Kota Palembang harus menjaga dan mempertahankan konsistensi dalam upaya pelaksanaan pengelolaan aset tetap dan agar terwujudnya akuntabilitas publik yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung (Simamora, 2011), (Febrianti, 2016) dan (Martini, dkk., 2019) yang menyatakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan BMD. Berbeda dengan penelitian (Abas, 2013), pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan masih relatif rendah.

4. Kesimpulan

Inventarisasi dan pelaporan yang berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Secara simultan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kota Palembang.

Peneliti selanjutnya, diharapkan lebih teliti dalam pemilihan populasi dan sampel yang digunakan. Selain itu diharapkan untuk mencari dan menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I. W. (2013). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 1-10.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2012-2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012-2017.
- Bokingo, A. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul). *Jurnal Katalogis*, 5 (12), 43-54.
- Detiksumsel. (2018, September 14). *Efen Permata*. Retrieved from <https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/>
- Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10 (1), 151-171.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Edisi ke-8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Sukmini, Martini, R., and H. Winarko, Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, 2019.
- Imbiri, J. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1 (2), 34-62.
- Klikanggaran. (2018, April 27). *Tim Berita*. Retrieved from <https://klikanggaran.com/anggaran/walikota-palembang-ke-mana-milyaran-aset-tidak-diketahui-keberadaannya.html>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A. and Murinda, A. N. Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan daerah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 25, no. 2, pp. 69-74, 2019. doi: 10.24114/jpkm.v25i2.13916.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli and Widyastuti, E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 106-123, 2019. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8364.
- Nur Shabrina, K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2 (1), 1-9.
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Simamora, F. M. (2011). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Selatan. Medan

Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan R&D*. Bandung: Alfabeta.